

Bimtek ke Luar Daerah Dievaluasi
Tahan 10 Telaah Staf, Munawar: *Output* Harus Tepat Sasaran



Sumber gambar :

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20241001_Bimtek-Bontang-Munawwar.jpg

Uang ratusan miliar rupiah dianggarkan untuk membiayai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) sejumlah organisasi perangkat daerah dan sekolah ke luar daerah.

BONTANG – Rapat koordinasi internal di lingkup Pemkot Bontang langsung dipimpin oleh Pjs Wali Kota Bontang Munawar, Senin (30/9). Pada kesempatan ini, Munawar menyoroti terkait banyaknya program Bimtek yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan Kaltim Post dalam rapat tertutup itu, Munawar mengaku kaget dengan kondisi tersebut. “Di hari pertama kerja sebagai Pjs (Wali Kota), saya sudah disodorkan 10 telaah staf,” kata Munawar.

Ia pun dengan lantang tidak akan membubuhkan tanda tangan terkait itu, jika telaah menyangkut *output* dari kegiatan itu tidak matang. Sebab anggaran sekitar Rp160 miliar digunakan untuk Bimtek. Apalagi pelaksanaan Bimtek dilakukan ke luar daerah. “Bontang saat ini sudah dikenal dengan Kota Bimtek oleh publik,” ucapnya.

Ia pun akan melakukan evaluasi secara internal. Menurutnya, evaluasi menasar adanya pengaturan ritme. Kegiatan pun tetap dapat dilakukan. Mengingat postur anggaran yang telah disetujui bersama. “Hanya harus melihat lagi kondisinya, sehingga tujuan Bimtek itu dapat tepat sasaran,” tutur dia.

Oleh karenanya, evaluasi turut dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dari kegiatan yang ada. Begitupun dengan ketepatan sasaran hingga adanya *output* yang maksimal. “Jangan sampai memakai anggaran untuk kegiatan yang tidak bermanfaat,” sebut dia.

Lebih lanjut, pihaknya pun melakukan rapat koordinasi kepada masing-masing OPD untuk kembali melihat kegiatan yang telah direncanakan. Ia menuturkan, penggunaan anggaran tidak boleh lepas dari tugas dan fungsi seharusnya. Terutama untuk mengantisipasi hal-hal yang mengarah pada sesuatu yang melanggar ketentuan.

Jika sepanjang evaluasi ditemukan adanya penyimpangan, tentu ada konsekuensi sebagai penyelenggara negara. “Sebelum terlanjur. Walaupun ada kegiatan yang juga sudah berjalan,” tandasnya.

Kabarnya, aparat penegak hukum juga diduga menarik diri menjadi narasumber Bimtek, pasca evaluasi yang dilakukan oleh Pemkot. Bahkan usai evaluasi internal, Pjs Wali Kota langsung menuju kantor salah satu aparat penegak hukum.

“Informasinya setelah rapat evaluasi Pak Pjs langsung menuju ke salah satu kantor aparat penegak hukum,” ujar salah satu informan Kaltim Post. Belum diketahui APH mana yang menarik diri menjadi narasumber Bimtek.

Sumber berita:

1. Kaltim Pos, Bimtek ke Luar Daerah Dievaluasi Tahan 10 Telaah Staf, Munawar: *Output* Harus Tepat Sasaran, 02/10/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
 - (5) Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
 - (6) Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
2. Dalam Pasal 70 ayat (4) PP 12/2019 diatur bahwa pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.